

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Era globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.

Untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan

keuangan. Pencermatan perlu dilakukan terhadap setiap elemen yang dilaporkan. Pencermatan yang dimaksud meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen yang dilaporkan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara meneliti setiap elemen, membandingkan nilai elemen tertentu dengan elemen lainnya untuk menghasilkan angka rasio keuangan, serta memprediksi kondisi di masa depan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan lebih efektif. Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan lebih efisien adalah perlu adanya suatu prosedur yang harus diatur dengan baik, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar – benar terarah dan dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan langkah maju dari Pemerintah Daerah khususnya dalam menata pemerintahannya. Dalam PP tersebut secara tegas diatur bagaimana Pemerintah Daerah menata pemerintahannya khususnya dibidang keuangan.

Berdasarkan PP 58 tahun 2005 pasal 7 menyebutkan bahwa setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang salah satunya adalah Neraca Daerah. Dengan adanya Neraca Daerah, publik akan tahu seberapa besar aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan berapa kewajiban yang harus ditanggung pemerintah tersebut.

Masyarakat akan secara jelas menilai kinerja seorang Kepala Daerah serta wakilnya di DPRD, misalnya kelayakan sebuah investasi, kelayakan penambahan utang yang menjadi beban pemerintah daerah.

Salah satu unsur yang paling penting dalam Neraca adalah aset, karena aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi aset dalam Laporan Neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang dan cadangan, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki (Mahmudi, 2007:91).

Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu daerah otonom. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya tentu tidak akan lepas dari penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten TTU terhadap publik. Salah satu unsur terpenting dalam laporan keuangan adalah neraca. Neraca merupakan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten TTU yang dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan merintis upaya peningkatan pelayanan publik melalui pelayanan perizinan terpadu. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya tentu tidak akan lepas dari laporan keuangan sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban KPPTSP terhadap pemerintah Kabupaten TTU yang ditujukan untuk publik. Salah satu jenis laporan keuangan adalah neraca. Aset KPPTSP merupakan bagian dari neraca KPPTSP.

Analisis aset pada KPPTSP Kabupaten TTU dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki KPPTSP.

Aset KPPTSP Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dalam tabel aset berikut ini:

Tabel 1.1**Aset Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu****Kabupaten Timor Tengah Utara****Tahun Anggaran 2011 - 2012**

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012
ASET		
Aset Lancar		
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 260.000,00	Rp 340.250,00
Piutang		
Piutang Retribusi		
Piutang lain-lain		
Persediaan		Rp 175.000,00
Alat tulis kantor & brg cetakan		Rp 175.000,00
		Rp
		515.2
Jumlah	Rp 260.000,00	50,00
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin	Rp 573.598.500,00	Rp 651.598.500,00
Alat angkut (kendaraan)	Rp 265.100.000,00	Rp 265.100.000,00
Alat kantor & rumah tangga	Rp 308.498.500,00	Rp 386.498.500,00
Gedung dan Bangunan	Rp 47.101.000,00	Rp 47.101.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
Buku/koleksi perpustakaan	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Jumlah	Rp 625.199.500,00	Rp 703.199.500,00

Tabel 1.1 Lanjutan
Aset Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2011 - 2012

Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		Rp 100.000.000,00
Sistem jaringan informasi perizinan		Rp 100.000.000,00
Aset Lain-lain		
Jumlah		Rp 100.000.000,00
JUMLAH ASET	Rp 625.459.500,00	Rp 803.714.750,00

Sumber data: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Timor

Tengah Utara.

Pada tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa aset KPPTSP Kabupaten TTU mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Namun dari peningkatan tersebut sampai saat ini diketahui KPPTSP masih menempati kantor bekas yang dulunya merupakan Kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Maka mengapa nilai aset dari gedung dan bangunan pada tabel neraca di atas hanya sebesar Rp 47.101.000,00, karena nilai tersebut hanya merupakan nilai paket rehabilitasi gedung kantor, sehingga laporan neraca dari nilai gedung dan bangunan KPPTSP hanya dibukukan sebesar nilai

rehabilitasinya. Akan tetapi walaupun sudah direhabilitasi kondisi dari kantor tersebut masih dalam kondisi yang kurang baik.

KPPTSP merupakan kantor yang baru didirikan sejak 30 Desember 2009 di Kabupaten TTU dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus segala bentuk perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Didirikannya KPPTSP juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan daerah yang berpotensi bagi Kabupaten TTU. Namun pada kenyataannya KPPTSP belum dibekali dengan fasilitas yang memadai seperti gedung kantor yang saat ini diketahui KPPTSP masih menempati kantor bekas yang sebelumnya merupakan kantor DPRD Kabupaten TTU sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sistem pelayanan perizinan menjadi tidak optimal. Selain dari itu, KPPTSP juga masih banyak memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi seperti penambahan printer, komputer, kalkulator dan alat komunikasi telepon. Karena diketahui di bagian loket pelayanan masih menggunakan sistem manual atau tanpa menggunakan alat media seperti komputer. Sehingga sistem pelayanannya menjadi tidak optimal dan dapat memakan waktu yang lama.

Dengan demikian tujuan didirikannya KPPTSP tidak sesuai dengan kondisi yang ditunjukkan saat ini, karena KPPTSP masih banyak memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Aset Kantor Pelayanan Perizinan**

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 – 2012 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kinerja Aset Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 – 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja Aset Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 – 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi bagi pemerintah Kabupaten TTU untuk melihat pengelolaan aset pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2011 – 2012
- b. Sebagai informasi bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten TTU untuk melihat pengelolaan aset tahun anggaran 2011 - 2012.
- c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan analisis aset pemerintah daerah pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.